

Kemitraan United State Agency for International Development dan Persatuan Waria Kota Surabaya dalam Penanggulangan HIV-AIDS (2014-2016)

**Purnama Pangribuan
Adiasri Putri Purbantina**

*Department of International Relations, Faculty of Social Science
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

email: purnamapang@gmail.com

email: adiasri.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand the social interactions and health services of transwomen HIV/AIDS survivors in Surabaya which are associated with the role of the United State Agency for International Development (USAID) in the Global Health Initiative discourse. This study uses a qualitative approach using interview guidelines and case study methods specifically to answer the research objectives. The information collected is information about the role of the Surabaya City Waria Association (Perwakos) in tackling HIV/AIDS in relations with USAID partners as International Donor Institutions, Program Implementation, Policy Development, Advocacy Assistance and Provision of Health Services. Taking into account the conditions, data was taken from five transwomen who were selected as informants who joined Perwakos using purposive and snowball sampling. This study used a qualitative analysis method through literature analysis and in-depth interviews with several representatives from the Surabaya City Waria Association (Perwakos).

Keywords: *LGBT Waria; Global Health Initiative; Penanggulangan HIV-AIDS; Peran USAID; Perwakos; Layanan Kesehatan.*

Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi sosial dan pelayanan kesehatan penyintas HIV/AIDS transpuan di Surabaya yang dikaitkan dengan peran United State Agency for International Development (USAID) dalam wacana Global Health Initiative. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara dan metode studi kasus secara spesifik untuk menjawab tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi mengenai peran Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos) dalam menanggulangi HIV/AIDS dalam hubungan dengan mitra USAID sebagai Lembaga Donor Internasional, Pelaksanaan program, Pengembangan Kebijakan, Bantuan Advokasi dan Penyediaan Layanan Kesehatan. Dengan memperhitungkan kondisi, data diambil dari lima Transpuan yang dipilih sebagai narasumber yang bergabung dalam Perwakos menggunakan purposive dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui analisis pustaka dan wawancara mendalam terhadap beberapa perwakilan dari Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos).

Kata Kunci: *LGBT Waria; Global Health Initiative; Penanggulangan HIV-AIDS; Peran USAID; Perwakos; Layanan Kesehatan.*

Pendahuluan

Di era globalisasi ini, isu-isu *low politics* menemukan momentumnya. Isu gender kini mendapatkan ruang yang lebih luas dalam diskusi politik global. Isu gender sebagai salah satu elemen krusial dalam isu pembangunan seringkali melibatkan peran organisasi internasional terutama di negara-negara berkembang yang seringkali masih belum memberikan prioritas pada hak-hak kaum marginal, utamanya pada komunitas Di era globalisasi ini, isu-isu *low politics* menemukan momentumnya. Isu gender kini mendapat ruang yang lebih untuk dikaji dalam hubungan internasional. Pengertian gender sendiri masih dianggap sebelah mata karena masih terbatas konstruksi laki-laki dan perempuan. Padahal, perubahan pada perempuan dan laki-laki bisa berubah berdasar waktu, tempat, ajaran, ideologi dan faktor lainnya. Diskursus gender dalam hubungan internasional bisa lebih luas melihat dari sektor politik, sosial, budaya, hukum, dll. Sehingga pada saat ini, aktor gender dalam hubungan internasional tidak hanya aktor Negara, akan tetapi individu atau kelompok masyarakat. Dengan bergeser atau bertambahnya aktor gender dalam hubungan internasional, sehingga tidak hanya soal laki-laki atau perempuan saja, namun berkembang hingga fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT) (World Health Statics, 2013).

Secara hukum, pengklasifikasian jenis kelamin di Indonesia bersifat biner, yaitu (laki-laki atau perempuan). Sebagai akibatnya, kebijakan penanganan pelayanan kesehatan relatif tidak mengakui keberadaan komunitas LGBT Waria. Pria *Transgender* dikenal dengan sebutan waria yaitu (singkatan dari wanita pria) Istilah lain yang seringkali digunakan masyarakat adalah, wadam yang merupakan (singkatan dari hawa adam). Istilah inilah yang seringkali diasosiasikan dengan “banci” (Koes Winarno, 2004).¹ Penulis menggunakan istilah waria dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan istilah waria dalam penelitian ini. Theodorson & Theodorson (dalam Danandjaja, 2003) menyatakan bahwa kelompok minoritas lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan prasangka dari sebagian besar masyarakat.

Kelompok waria merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok yang dianggap minoritas di Indonesia. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pada Desember 2015 menyampaikan bahwa data menunjukkan sebanyak 643 orang mengidap AIDS dan 10.113 orang terinfeksi HIV kelompok waria jarang mendapat penerimaan dan tidak mendapat hak-hak semestinya didapat orang-orang padang umumnya. Selain itu, kelompok waria sering mendapatkan diskriminasi oleh lingkungan masyarakat. Persentase dan data tersebut dilaporkan dari 5 provinsi di Indonesia, dengan jumlah kumulatif yaitu Sumatera Utara dengan angka 4,5%, DKI Jakarta dengan angka 3%, Jawa Barat dengan jumlah 4%, Jawa Tengah dengan jumlah 3%, dan Jawa Timur dengan jumlah 5% pada tahun 2015. Secara keseluruhan, dengan persentase, 20% penolakan dari keluarga dan lingkungan asal, 65% harus tinggal di tempat sewa karena mendapat diskriminasi dari tempat asal, dan 76,5% mengalami penolakan karena *dress up* sebagai waria. Kejelasan sikap sosial dan budaya dalam ragam dalam identitas gender dan orientasi seksual di Indonesia masih bertolak belakang jauh dengan apa yang diharapkan oleh kaum minoritas tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015).

Dalam dunia internasional, terdapat salah satu bentuk aksi global yang berfokus pada upaya peningkatan kapasitas kebijakan pelayanan kesehatan yaitu *Global Health Initiative* (GHI). GHI mengupayakan pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang yang menghadapi permasalahan kesehatan, terutama penyakit-penyakit prioritas, salah satunya HIV-AIDS. Penanganan HIV-AIDS menjadi salah satu aksi global yang sangat dibutuhkan

¹ Penulis menggunakan istilah waria dalam penelitian ini.

karena HIV-AIDS sudah dianggap sebagai Endemic dan menunjukkan semakin rentannya kondisi kesehatan di suatu negara (*public health risks & threats*). Ancaman dari suatu endemic atau *disease* tidak mengenal batas negara lain. Utamanya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan uraian dari *World Health Organization* (WHO), WHO mencatat berbagai persoalan kesehatan global yang akan menjadi tantangan masyarakat dunia dalam satu dekade ke depan. Tantangan utama menyangkut isu kesehatan nasional saat ini adalah tidak meratanya akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Suatu negara dituntut untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa memandang gender atau latar belakang warganya (CSID, 2019).

United State Agency for International Development (USAID) adalah mitra kerjasama dari luar negeri berupa lembaga donor untuk menyukseskan GHI di Indonesia. USAID berperan sebagai organisasi internasional yang memberikan donor dana hibah kepada komunitas lokal. Peran komunitas lokal ini dianggap akan menyukseskan GHI, salah satunya pengupayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos)² yang merupakan komunitas lokal dianggap berpotensi menjadi sarana dan bantuan dalam upaya membangun kerjasama dalam penanganan *global health security* dan menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas kesehatan yang mengutamakan tindakan kesehatan dalam penanganan kritis dan rekonstruksi kebijakan. USAID hadir sebagai Pemanfaatan mekanisme kerjasama internasional yang berupaya untuk mengembangkan kapasitas dalam negeri guna menangani kasus-kasus endemis, salah satunya HIV-AIDS dan sekaligus diharapkan dapat mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs) terkait sektor kesehatan.

Layanan kesehatan seksual dan reproduksi ditujukan kepada orang-orang heteroseksual. Padahal ada kebutuhan akan layanan konseling dan perhatian terhadap permasalahan psikoseksual dan kesejahteraan seksual, juga kebutuhan akan informasi dan dukungan bagi kelompok transgender sehubungan dengan terapi hormon, serta kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan pelatihan petugas kesehatan agar lebih peka terhadap permasalahan dan orang-orang LGBT. Meluasnya stigma yang menolak program-program bagi penderita. Contohnya meliputi sedikitnya bantuan dari pemerintah lokal/ skema BPJS, tidak adanya jaminan kerahasiaan hingga tidak adanya peraturan undang-undang yang melindungi para waria. Sehingga sehubungan dengan hak-hak LGBT di Indonesia adalah pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakannya sebagai hal yang sarat korupsi. Konteks ini secara luas berdampak negatif pada upaya pengembangan hak-hak LGBT di Indonesia.

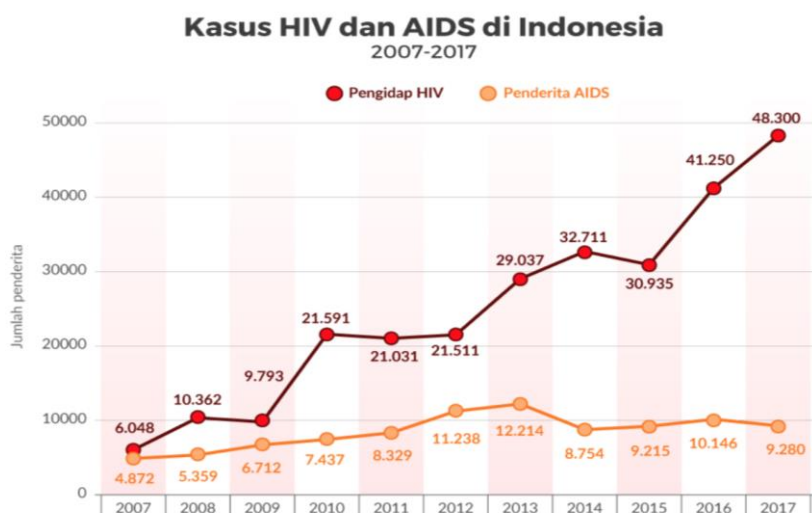
Secara landasan hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan yang menjamin hak asasi warga negara akan dipenuhi. Hak yang diakui dan wajib dipenuhi negara adalah hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jaminan negara tersebut dituangkan ke dalam undang-undang sebagai berikut: (a) UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik); (b) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (c) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; dan (d) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23/2006 Administrasi Kependudukan.

Semua aturan di atas, tidak ada yang melarang waria untuk memperoleh pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, kependudukan, bantuan hukum dan sebagainya. Di depan hukum, waria memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Namun di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, masih banyak diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang dialami waria. Perangkat hukum sudah ada, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, profil waria yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan

² Dapat diakses melalui <http://perwakos.blogspot.com/>

refleksi sekaligus evaluasi terhadap implementasi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan politik waria.

Stigma negatif dari masyarakat membuat terabaikannya variasi gender dalam pelayanan kesehatan. Pemutusan akses terhadap jasa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh kelompok waria, padahal akses pengobatan HIV-AIDS bagi kelompok waria sangat dibutuhkan. Permasalahan ini yang menjadi sorotan dan perhatian USAID, sehingga pada tahun 2014 USAID memberikan bantuan khusus ditujukan bagi kelompok Waria di kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan angka Infeksi Menular Seksual (IMS) yang terus mengalami peningkatan dan cenderung meningkat juga di Indonesia, khususnya di kota Surabaya (Penabulu Foundation, 2015).



Gambar (1). Grafik HIV-AIDS di Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (diolah)

Setiap tahun di Indonesia, informasi dan sumber daya tentang kesehatan dan kesejahteraan kelompok Transpuan di Indonesia selalu dikaitkan dengan penyakit menular seksual (PMS) dan penyebaran virus HIV. Sedangkan, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi mayoritas ditunjukkan kepada orang-orang heteroseksual. Sedangkan kelompok transpuan banyak membutuhkan pelayanan konseling dan perhatian terhadap permasalahan psikoseksual dan kesejahteraan kesehatan, juga kebutuhan akan informasi dan dukungan bagi kelompok transpuan. Secara umum, permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh kelompok transpuan adalah sehubungan dengan terapi hormone, minimnya bantuan kondom oleh pemerintah serta kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan wawasan kesehatan melalui petugas kesehatan agar lebih peka terhadap permasalahan kesehatan kelompok LGBT (Laporan LGBT Nasional Indonesia UNDP, 2014).

Waria merupakan salah satu kelompok resiko tinggi (risti) untuk tertular IMS (Infeksi menular seksual) dan HIV. Prevalensi IMS pada transpuan masih tinggi terbilang tinggi, hal ini dikarenakan penggunaan kondom masih rendah dan hal tersebut memacu terjadinya IMS pada kelompok yang sering bergonta-ganti pasangan, hal tersebut juga dipicu dengan tingkat pengetahuan yang rendah tentang pencegahan. Surabaya, merupakan salah satu kota dengan mobilitas dan jumlah waria yang terbilang cukup tinggi, hal tersebut didukung dengan cukup banyaknya tempat-tempat lokalisasi sehingga penyebaran IMS menjadi cukup

tinggi. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pada tahun 2014, jumlah waria di Surabaya mencapai 293 orang, yang bertempat tinggal di beberapa daerah Surabaya yaitu Pasar Kembang, Gang Dolly, Tambak Asri, Moroseneng, Kedungdoro hingga Waru perbatasan dengan Sidoarjo (Laporan Tahunan Yayasan, Mahameru, 2017).

Secara historis, kelompok transpuan dan polemik HIV-AIDS di Surabaya memiliki beberapa catatan dan agenda perjuangan. Surabaya sendiri mencatat sejak tahun 1991 sudah menyelenggarakan *International AIDS Candlelight Memorial* pertama diselenggarakan di Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Malam Tirakatan Mengenang Korban-Korban AIDS, oleh Kelompok Kerja Lesbian & Gay Nusantara (Sekarang Gaya Nusantara), dengan bantuan dari Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos). Hingga acara tersebut berlangsung, jumlah penderita HIV-AIDS yang menjangkit kelompok Transpuan di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Memahami pelayanan kesehatan dan kesehatan itu sendiri menjadi hal yang sangat krusial. Oleh karenanya, memahami dan mengusahakan pelayanan kesehatan yang adil dan layak untuk para waria tanpa memandang gender merupakan suatu keputusan rasional dalam kebijakan kesehatan.

Kebijakan kesehatan di Indonesia yang telah disusun dan diimplementasikan masih jauh dari pertimbangan mengenai kondisi kerentanan komunitas LGBT Transpuan yang relatif berbeda dengan kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya. Namun secara luas, pembuatan kebijakan kesehatan di Indonesia masih belum menanggapi isu LGBT Transpuan sebagai isu yang prioritas (Etty Padmiati, 2008:5). Isu dan kegiatan advokasi untuk memajukan peluang akses layanan kesehatan, khususnya terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) mengemukakan dalam pemberitaan di media-media. Merujuk pada Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia, pandangan dan reaksi terhadap pemberitaan dan kebijakan tersebut beragam, ada yang mendukung dan menolak. Tulisan ini hendak membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Perwakos dalam mengurangi angka penderita HIV-AIDS dan mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan bagaimana peran USAID dalam menanggulangi angka penderita HIV-AIDS dalam mencapai *Global Health Initiative* melalui kerjasama dengan Perwakos (Laporan LGBT Nasional Indonesia, 2013).

Kajian Teori

Kajian Teori dalam penelitian ini adalah teori dari Manuell Castell tentang *Network Society* dan tero dari Finnemore and Sikkink mengenai *The Norm 'Life-Cycle' Theory*. Manuel Castells (1996), mengatakan bahwa jejaring komunikasi yang menyebabkan hubungan antar masyarakat di seluruh dunia berjalan secara cepat dan dapat menimbulkan dilema antara tetap bertahan dalam identitas asli (*the self*) atau ikut melebur dalam identitas masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat jaringan global (*the net*). Kuatnya penetrasi budaya yang terglobalkan menyebabkan sebagian orang merasa identitas aslinya telah usang karena tidak sejalan dengan globalisasi.

Network Society Theory ini menjadi penting untuk kita mengetahui apa itu informasional, masyarakat jaringan dan bagaimana perkembangan kapitalisasi melalui pandangan Castells. Castells berpandangan bahwa informasional dan masyarakat jaringan adalah informasi yang tersebar luas dan dapat diakses oleh siapa saja, jadi dapat kita katakan bahwa peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan dan sarana hiburan yang tersedia. Di era masyarakat modern dan globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan kekuatan informasi telah melahirkan gaya hidup baru. Sehingga di era globalisasi, nyaris tidak ada aspek kehidupan manusia yang lepas dari kehadiran teknologi informasi. Kehadiran televise, handphone, computer, dan internet merupakan

berbagai perangkat teknologi informasi yang dengan cepat mengubah pola kehidupan dan gaya masyarakat.

Teori ini menjelaskan mengenai kerangka konseptual terkait proses adopsi norma internasional oleh negara. Finnemore and Sikkink yang secara khusus menjelaskan teori tersebut dalam dimensi hubungan internasional (Frantz dan Pigozzi 2018). Teori norma tersebut menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan diantaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Finnemore and Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norms entrepreneur* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

Berdasarkan Model *Norm Life Cycle* diatas, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan diantaranya Norm Emergence, Norm Cascade, dan Internalization. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional. Untuk dapat memahami lebih detail mengenai proses *Norm Life Cycle*, Penulis akan menyajikan tabel yang berisikan langkah-langkah dalam memunculkan, menyebarkan hingga norma tersebut dapat mengakar dalam suatu negara.

Metode Penelitian

Artikel penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam yang secara spesifik menjawab tujuan penelitian dan mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok transpuan di kota Surabaya, namun masih tetap membutuhkan data sekunder dan kajian pustaka. Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus instrumental yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penanggulangan HIV-AIDS kelompok waria, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan dan peranan USAID sebagai organisasi donor hibah internasional yang berperan untuk mengupayakan penanggulangan HIV-AIDS bagi kelompok waria di kota Surabaya.

Wawancara dan penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah kota Surabaya yaitu wilayah Pacarkembang yang dijadikan sebagai kantor atau tempat berkumpul para transpuan yang tergabung dalam komunitas Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS). Pengambilan participant yang akan dijadikan narasumber dalam wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* dengan karakteristik transpuan yang berdomisili di wilayah Pacarkembang. Narasumber yang bersedia diwawancara juga memberikan rekomendasi kepada partisipan lainnya untuk dijadikan narasumber. Dari satu transpuan, sebut saja Y sebagai narasumber pertama, Y kemudian merekomendasikan 4 transpuan untuk dijadikan narasumber. Penelitian ini menjadikan 5 transpuan dari total dua puluh transpuan yang tinggal di Gang 'A'.

Tabel (1). Identitas Narasumber Wawancara

Nama	Status	Kependudukan	Usia	Lama bergabung
Y	Pemilik kost	Penduduk Asli	54 tahun	22 tahun
B	Pengamen	Pendatang	34 tahun	15 tahun
P	Pekerja Salon	Pendatang	28 tahun	9 tahun
S	Pengamen	Pendatang	31 tahun	12 tahun
E	Pengamen	Pendatang	31 tahun	13 tahun

Sumber: Penulis

Hasil dan Diskusi

Political Opportunity

Pemerintah Kota Surabaya sudah banyak melakukan upaya dan pemrograman untuk terus mengurangi angka IMS dan HIV Transpuan di Surabaya. Sekitar tahun 2013 hingga 2014, sejumlah lokalisasi di Surabaya ditutup dalam masa pemerintahan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Tercatat pada tahun 2013, sekitar 150 lebih transparan yang ada di lokalisasi yang akan direvitalisasi oleh Pemkot Surabaya. Keputusan Pemkot Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda, 1999) dimana melarang sebuah bangunan digunakan untuk tempat prostitusi. Pemkot Surabaya dalam wacana revitalisasi wilayah lokalisasi lebih mengedepankan pendekatan personal, agar penutupan lokalisasi didasari pada niat pekerja seks atau kelompok transpuan dapat beralih profesi.

Realita pada tahun 2013 tidak berjalan sesuai dengan program pascarevitalisasi Pemkot Surabaya. Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) begitu merasakan dampaknya. Transpuan yang tergabung dalam Perwakos merasakan hilangnya lapangan pekerjaan dan stigma masyarakat yang semakin melekat. Razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuat para transpuan kesulitan untuk bekerja, karena setelah revitalisasi, Pemkot Surabaya minim memberikan pemberdayaan dan peluang kerja di bidang lain dan pada akhirnya, Kelompok Transpuan hanya kembali pada pekerja seks komersial karena tidak diberikan pelatihan maupun akses oleh Pemkot Surabaya. Pada tahun 2014, Perwakos membuat dan mengajukan proposal kepada Organisasi Internasional yaitu USAID untuk bisa memberikan mereka bantuan dan solusi, khususnya dalam membantu kelompok transpuan mendapat pelayanan kesehatan untuk penyakit HIV/AIDS.

Langkah maju dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS adalah peranan organisasi internasional USAID yang berbasis kemitraan untuk menjalankan program prioritas, ekonomi, pangan dan kesehatan. Surabaya melalui Perwakos daerah yang bermitra dengan USAID dalam penyediaan prioritas pelayanan kesehatan dan mewujudkan kesetaraan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kelompok Transpuan di Surabaya. Kemitraan USAID sejalan dalam mendukung visi Perwakos yang berkeinginan untuk terus menurunkan angka kematian akibat HIV/AIDS dan meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Transpuan di Surabaya. USAID merencanakan, mendanai dan melaksanakan inisiatif kesehatan kelompok transpuan menjadi prioritas, meningkatkan penerapan standar perawatan; meningkatkan pasokan dan kualitas obat-obatan yang ada serta memastikan kelompok Transpuan mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS).

Program kemitraan USAID dengan Perwakos dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi kelompok waria di Surabaya berupaya untuk mengatasi stigma dan diskriminasi dalam lingkungan sosial, khususnya masyarakat setempat disertai dengan pembauran sosial

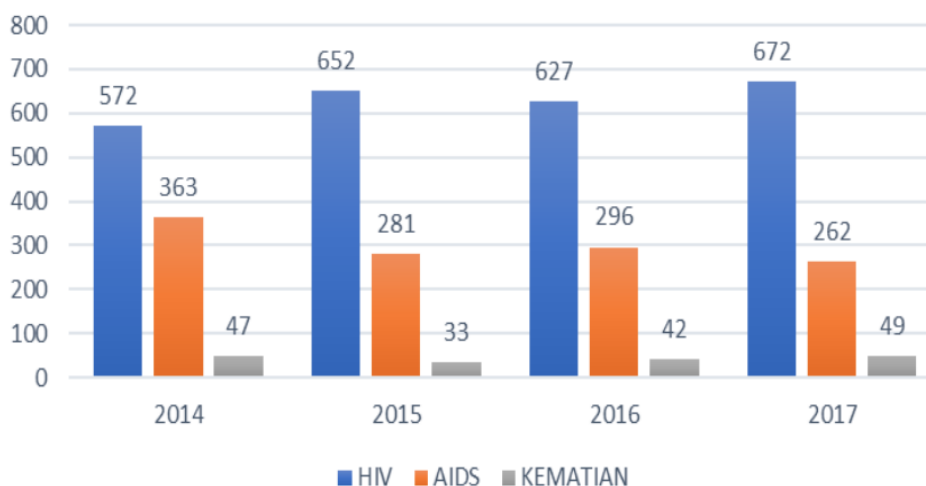
disertai perubahan reformasi hukum positif dan penerimaan masyarakat. Birokrasi Indonesia baru mengupayakan dalam 10 tahun belakangan ini, merujuk pada Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional serta Permenkokesra No. 33 Tahun 2013 tentang Tim Pelaksana KPAN. Kelompok yang termarjinalkan salah satunya waria, diupayakan untuk mendapat ruang kerja yang sama, memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai kekuatan yang sama dalam mendapat hak pelayanan dan program kesehatan baik skala nasional atau wilayah provinsi.

Peran United State Agency for International Development (USAID)

Proporsi anggaran dana dalam negeri pada tahun 2014 hingga 2016 dalam skala nasional masih berkisar 40% dan anggaran tersebut masih memerlukan dukungan dari pihak eksternal pemerintah. Hal ini yang mendasari Perwakos menjalankan kemitraan dengan USAID. Perwakos membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan program penanggulangan dan penyuluhan HIV-AIDS bagi waria di Kota Surabaya. Pengaruh USAID dalam memberikan bantuan dan dukungan terhadap komunitas local di Surabaya cukup mempengaruhi. Peran USAID juga turut meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam penanggulangan HIV-AIDS kelompok Transpuan karena peran strategisnya dalam penanggulangan HIV-AIDS (Najib, 2014). Hal ini sejalan dengan respon terhadap epidemi HIV di Indonesia yang terlang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Dana hibah dan program dari USAID meningkatkan kemungkinan kedepannya yang bisa dikembangkan untuk mendorong optimisme kelompok Transpuan dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak.

USAID di Indonesia sering kali diterjemahkan sebagai upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit prioritas, salah satunya HIV-AIDS. Keberadaan USAID sebagai GHI dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia muncul sebagai respon tanggap darurat untuk mengurangi dampak buruk dari penyebaran penyakit. Dana hibah bantuan luar negeri untuk Program HIV/AIDS di Indonesia selama ini merupakan bagian inisiatif global dalam bidang kesehatan (*Global Health Initiatives-GHI*). Upaya-upaya yang dilakukan dalam skema ini biasanya mampu memobilisasi sumber dana dalam jumlah besar dan menyalurkan secara langsung baik ke lembaga pemerintah maupun non-profit, termasuk komunitas lokal yang diolah oleh masyarakat sipil. Mengingat sistem kesehatan pada dasarnya merupakan landasan utama intervensi HIV-AIDS, maka kebijakan dari USAID menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan menjadi "*necessary and sufficient condition*" bagi efektivitas respon terhadap HIV di Surabaya.

Perkembangan Kasus HIV-AIDS di kota Surabaya tahun 2014-2017



Gambar (2). Grafik Perkembangan HIV-AIDS di Surabaya

Sumber: Data Kemenkes 2018

Advokasi dan Kebijakan

Persatuan Waria Kota Surabaya atau Perwakos dibentuk sejak tahun 1980 di Surabaya. Perwakos dibentuk tidak hanya sebagai organisasi semata namun bertujuan sebagai wadah bagi para waria/ transpuan yang ada di Surabaya. Peranan Perwakos meliputi mengatasi permasalahan sedikitnya lapangan pekerjaan sektor formal untuk para waria dan membantu para waria untuk mengembangkan keterampilan khususnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Perwakos memiliki beberapa program untuk terus memberdayakan para waria, agar tidak hanya menggantungkan hidupnya sebagai pekerja seks komersial, namun bisa menjadi pekerja salon, tenaga penyuluhan HIV-AIDS di Puskesmas, asisten rumah tangga, penjual makanan atau pekerja sektor informal lainnya. Hingga saat ini, Perwakos menjadi salah satu organisasi transpuan terbesar di Surabaya dan di Indonesia (Arsip Badan Kearsipan Prov. Jawa Timur, 1986). Salah satu yang kelemahan yang paling dirasa adalah dari segi komunikasi para transpuan kepada masyarakat setempat. Sebagaimana diungkapkan salah satu informan dari penelitian ini.

“Para waria/transpuan masih dianggap sebagai manusia yang melanggar norma masyarakat dan pelaku dalam menyebarkan penyakit HIV di Surabaya. Selain itu, para transpuan kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal secara mandiri, dikarenakan penolakan dari masyarakat atau RT setempat” – Narasumber 1

Kompleksitas permasalahan kelompok waria di Kota Surabaya diperparah dengan stigma negatif dari masyarakat. Posisi sebagai kelompok yang termarginalkan membuat para waria kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan pengakuan dalam konteks hak asasi manusia. Banyak permasalahan yang diangkat ke permukaan, salah satunya konflik pandangan secara hukum. Sebelum tahun 2000-an, muncul sebuah isu dimana terdapat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa ‘Di dalam hukum tidak ada waria/transpuan’(Pangky Kehntut Menggugat: Liberty,1989). Memang berdasar kondisi di masyarakat, keberadaan dan posisi kelompok waria belum menemukan titik jelas, baik secara hukum nasional maupun hukum

daerah. Hal ini juga bermasalah dalam aturan pemerintah kota Surabaya. Permasalahan identitas diri masih sangat butuh pengakuan dan perjuangan di mata masyarakat. Berdasar hasil wawancara, para narasumber menjelaskan bahwa menjadi waria sebenarnya bukanlah keinginan mereka. Keinginan merubah gender dan penampilan muncul karena mereka ingin hidup sesuai dengan apa yang mereka rasakan sejak tumbuh remaja. Sedangkan dalam pandangan masyarakat, perubahan atau variasi gender selain laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diterima.

Perwakos menjadi wadah para waria kota Surabaya untuk berlindung dan memperjuangkan haknya. Para Waria merasa, apabila mereka berkumpul dan tinggal bersama dalam lingkungan yang sama, hak untuk beradaptasi di masyarakat bisa lebih mudah. Para waria juga mengupayakan dalam memperbaiki image negatif dengan mengupayakan hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini sejalan dengan program rutin Perwakos untuk terus melaksanakan kegiatan penyuluhan HIV-AIDS di Puskesmas setempat serta berusaha untuk bekerja di sektor informal lainnya. Program lainnya yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para waria, mulai dari kursus salon kecantikan, keterampilan menjahit pakaian hingga keterampilan informal lain. Hal ini yang bisa dipahami dan dilihat sebagai bentuk besar keinginan para Transpuan untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik.

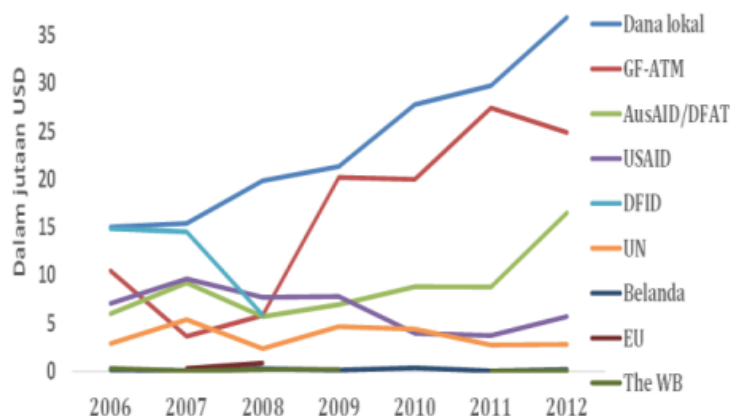
“Secara struktur dan birokrasi, para transpuan seharusnya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Namun, Pemda tidak pernah memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada para transpuan, karena masih tingginya stigma negatif di kalangan masyarakat luas. Seharusnya pemerintah bisa hadir sebagai pemecah stigma negatif tersebut dengan cara tetap memberikan pelayanan dokumentasi dan kesehatan secara adil tanpa memandang gender” – Narasumber 2

Rata-rata lama keanggotaan para waria yang menjadi narasumber lebih dari 10 tahun telah bergabung dengan Perwakos, bahkan berdasar salah satu narasumber, sebelum masalah HIV menjadi endemik di Indonesia dan skala internasional. Berdasar pemaparan para narasumber, sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak berasal atau bukan domisili Surabaya, tapi mereka pergi merantau ke Surabaya dengan harapan bisa tinggal dan hidup lebih baik dan bebas. Hal ini diduga karena tingginya stigma dan diskriminasi serta masalah sosial yang dihadapi transpuan tersebut. Walau demikian, para transpuan ini merasa bahwa hidupnya sudah merasa lebih bebas. Adanya perubahan yang dipengaruhi lingkungan dan sosial tidak menyurutkan para transpuan ini tetap mengikuti kata hatinya sebagai waria/transpuan. Semua responden yang diwawancarai juga ikut merasakan program USAID kepada Perwakos. Sehingga para narasumber merasa bahwa kemitraan USAID dengan Perwakos memberikan dampak positif dan harapan untuk program positif yang akan mereka lakukan agar memberi dampak positif untuk masyarakat sekitar dan menurunkan angka penderita HIV-AIDS di Kota Surabaya pada tahun 2014-2016.

Upaya untuk menjangkau akses kesehatan yang lebih layak bagi kelompok waria di Kota Surabaya, khususnya dalam pengobatan penderita HIV-AIDS terus menjadi prioritas Perwakos dan USAID. berdasar data STBP 2011 dan *Community Access to ARV Treatment Study* 2013, Transpuan berada pada angka 31% dalam kelompok masyarakat paling terdampak HIV dan Surabaya berada pada angka 49% dari 6 kota di Indonesia. Berarti secara luas, masyarakat kita sebenarnya sudah mengetahui bagaimana situasi epidemi HIV-AIDS ini sendiri baik dalam skala Nasional maupun Daerah. Namun, tetap saja kelompok Transpuan masih lekat dalam stigma negatif dan mengesampingkan legitimasi keberadaan dan peran mereka. Namun, masyarakat masih sulit menerima variasi gender selain laki-laki dan perempuan. Besar harapan kelompok waria di Surabaya, masyarakat mau untuk mulai menerima keberadaan mereka, dan pemerintah pusat dan daerah harus menjadi penggerak untuk menghilangkan stigma negatif tersebut.

“Banyak dari kami para transpuan yang merantau dari tempat lahir atau tempat asal. Karena birokrasi yang sudah lama tidak diurus di tempat asal, membuat identitas kami dianggap mati oleh pemerintah setempat, sehingga ketika kami ingin mendapatkan bantuan sosial dan bantuan kesehatan dari pemerintah tempat tinggal sekarang, kami kesulitan mengurusnya, dikarenakan identitas tidak sesuai aslinya dan dianggap mati oleh berkas pencatatan sipil tempat asal” – Narasumber 3

Semua narasumber yang diwawancarai merasa bahwa sudah pernah melakukan advokasi dan pengajuan hak pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Kesehatan Kota Surabaya, supaya para Transpuan mendapat bantuan dana pengobatan BPJS dan pelayanan kesehatan lainnya. Namun, hingga tahun 2021 perhatian Pemda Surabaya masih sangat sedikit, bahkan untuk membantu melegalkan berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk proses pendaftaran BPJS sangat sulit. Walau Perwakos termasuk dalam komunitas Transpuan terbesar di Jawa Timur, tetap ada resiko nyata sulitnya mengurus berkas catatan sipil dan mendapat bantuan sosial ataupun dana pengobatan dari pemerintah. Namun demikian, para narasumber tetap merasa terbantu dengan tertolong dengan bergabung Perwakos karena dengan bergabung dalam komunitas, para transpuan mereka lebih aman dalam lingkungan masyarakat.



Gambar (3). Dana Hibah Program HIV-AIDS Organisasi Internasional di Indonesia

sumber: *Penabulu Foundation*

Walau banyak dampak positif yang dirasakan oleh Perwakos sebagai komunitas local pemberdayaan Transpuan, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak memberikan dampak pula pada program pemerintah, baik secara nasional maupun daerah. Kemitraan USAID dengan Perwakos memberikan program yang lebih terarah baik secara dampak maupun pengelolaan dana hibah. Berjalannya koordinasi yang mengatur perencanaan serta pengelolaan agenda kerjasama. USAID juga membantu dalam hal memantau dan mengevaluasi program kerjasama, khususnya agenda kesehatan baik skala komunitas daerah hingga dampaknya ke tingkat nasional. USAID mendorong terjadinya diskusi dan perdebatan tentang sejauh mana pemerintah nasional melaksanakan program kesehatan kepada kelompok transpuan, khususnya peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Dana hibah dan program yang disusun dirasa lebih efektif dan terlaksana karena kecenderungan pelaksanaan program secara vertikal oleh USAID. Selain memberikan fokus pada penguatan sistem kesehatan HIV-AIDS, USAID juga memberikan perhatian yang cukup besar kepada partisipasi masyarakat sipil di dalam penanggulangan HIV-AIDS melalui program strategiknya, salah satunya adalah berjalannya program penyuluhan HIV-AIDS di Puskesmas daerah Pasar Kembang Surabaya.

Berdasar hasil pengamatan dan wawancara, program strategik USAID dalam penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS adalah dimulai dari upaya-upaya penguatan sistem komunitas. Perwakos sebagai Komunitas Lokal yang diberikan dana hibah oleh USAID diberikan kesempatan untuk melaksanakan program penyuluhan pencegahan HIV-AIDS, karena merekalah yang paling memahami isu, tantangan dan kebutuhan kesehatan di lapangan. Oleh sebab itu, sistem komunitas yang kuat diperlukan dalam upaya untuk memastikan program yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan, serta akuntabel dan berkualitas, baik dari aspek cakupan, akses, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Akhirnya, situasi ini yang mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih mengkaji kebijakannya dan menelaah ulang mengenai program pemerintah nasional, sehingga kelompok Transpuan bisa mendapat pelayanan kesehatan lebih baik dan tentunya menurunkan stigma negatif dari masyarakat luas terhadap kelompok Transpuan.

Keberadaan USAID harus diakui telah menjadi sentra gravitasi yang menyokong keberlangsungan hidup Perwakos yang bergerak dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Sedangkan di satu sisi, apabila Lembaga donor atau USAID tidak lagi mengucurkan dana sumbangannya kepada komunitas local/ Perwakos terjadi, maka bisa dipastikan eksistensi Perwakos akan kolaps. Namun, hal ini masih terus dicegah oleh Perwakos, karena mengingat visi-misi Perwakos memang adalah komunitas misi sosial bukan *profit-oriented*. Walau didasari pertimbangan-pertimbangan dan dari anggaran dalam menjaga konsistensi misi sosial Perwakos, *value-driven* Perwakos yang menjadi pendorong Perwakos untuk tetap mempertahankan misi sosial mereka, baru kemudian berusaha untuk terus mendapat bantuan dari Lembaga donor atau USAID untuk mengimplementasikannya. Sehingga kegiatan dan program penanggulangan dan penyuluhan HIV-AIDS yang dilaksanakan Perwakos tetap bisa berjalan dengan pertimbangan peluang mendapatkan dana.

Berdasar hasil wawancara dan pengamatan, terdapat beberapa program yang membuat Perwakos dapat memberikan gambaran kepada Pemda Surabaya untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada kelompok Transpuan. Pertama adalah seperti yang dikemukakan diatas, dana hibah USAID kepada Perwakos untuk komunitas lokal yang bisa membuktikan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak kemanusiaan dan setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tanpa memandang gender. Kedua adalah berusaha memetakan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu daerah Surabaya untuk terus melakukan penyuluhan dan penanggulangan HIV-AIDS di wilayah Surabaya. Ketiga adalah tugas untuk memberikan pekerjaan kepada para staf yang membantu pelaksanaan program. Keempat, adanya kepercayaan bahwa dengan terikat kontrak dengan Lembaga donor atau USAID akan semakin meningkatkan konsentrasi untuk mengerjakan program yang menjadi prioritas utama. Kelima, USAID sebagai pengawas untuk memastikan program berjalan dengan konsisten dan baik sesuai dengan yang sudah dirancang. Para petinggi pemerintah atau Perda Surabaya diharapkan mampu memainkan perannya dan merubah pelayanan kesehatan sesuai dengan mandat dan program nasional dalam penanggulangan HIV-AIDS.

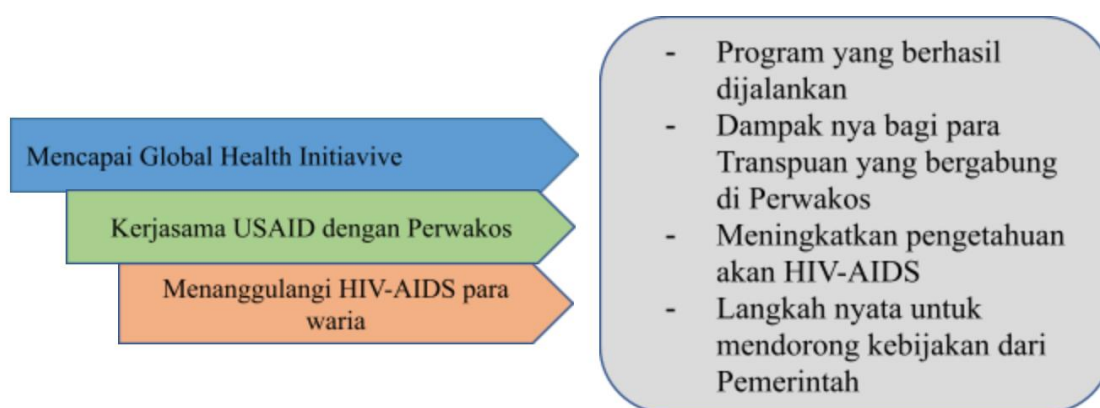
Kesimpulan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya diikuti oleh peningkatan isu kesehatan. Hak asasi manusia seharusnya menjadi dasar yang mewujudkan upaya perbaikan bidang kesehatan sehingga bisa lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat secara luas. Stigma negatif masyarakat menjadi dirasa menjadi kendala utama dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi kelompok waria. Selain itu, pendanaan serta arahan yang tidak tegas dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang membuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya pengobatan HIV-AIDS masih mengalami kendala. Terdapat beberapa upaya yang bisa diusahakan, baik dalam skala pemerintah

maupun kemitraan komunitas dengan organisasi internasional. Mulai dari strategi penyampaian menuju Tujuan Pembangunan Nasional-Internasional, Komitmen secara politik untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesehatan serta meningkatkan mobilisasi aksi kesehatan dan tentunya berupaya menyusun kebijakan publik yang fokus pada kesehatan dan investasi bidang kesehatan, diikuti wacana penguatan sistem kesehatan yang bisa dijangkau secara layak dan mudah oleh semua masyarakat tanpa memandang latar belakangnya.

Perwakos dalam proposalnya kepada USAID juga menjadi langkah progresif untuk berupaya dalam menanggulangi HIV-AIDS dikalangan transpuan di Surabaya. Kerjasama USAID dengan Perwakos melalui pengelola dana hibahnya telah berupaya untuk membuat akses pengobatan para waria di Surabaya lebih efisien dan memastikan bahwa dana disalurkan sebagaimana mestinya. USAID juga memberikan kesempatan untuk para transpuan melaksanakan program penyuluhan HIV-AIDS di Puskesmas wilayah Pacarkembang, Surabaya sebagai bentuk kegiatan penjangkauan dan pendampingan terhadap waria yang terinfeksi HIV-AIDS.

Diskusi dan wawancara empiri atas keterkaitan USAID dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dengan Perwakos divisualisasikan secara sederhana dalam gambar dibawah.



Gambar (4). Visualisasi Kerangka Keterkaitan USAID dengan Perwakos

Sumber: *Penabulu Foundation* (diolah)

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan sebagai seorang transpuan memiliki pro-kontra terhadap lingkungan sekitar terutama lingkungan terdekatnya dan terhadap dirinya sendiri. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh Transpuan di Surabaya dalam melawan stigma negative dan minimnya hak pelayanan kesehatan untuk penyintas HIV-AIDS. Sangat sedikitnya kontribusi Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan bantuan sosial dan bantuan kesehatan, padahal pelayanan kesehatan adalah hal mendasar dan mutlak bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang gendernya. Permasalahan mengenai pencatatan sipil yang tidak menemui titik terang juga menjadi salah satu penyebab birokrasi para transpuan terhambat.

Keberadaan GHI dalam pembangunan sektor kesehatan dalam kerjasama USAID dengan Perwakos muncul sebagai respon tanggap darurat untuk mengurangi dampak buruk dari penyebaran penyakit, khususnya di negara-negara miskin dan berpendapatan rendah. GHI di

banyak negara seringkali diterjemahkan sebagai upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit prioritas, salah satunya HIV-AIDS (Biesma, Harmer, Walsh, Spicer, & Walt, 2009). Keberadaan GHI juga mendorong terjadinya diskusi dan perdebatan tentang sejauh mana GHI telah mempengaruhi sistem kesehatan di negara-negara penerima bantuan, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan terhadap norma baru yang berubah dalam lingkungan sosial sekitar kelompok waria tinggal. Peranan norma yang terbentuk memberikan gambaran optimis terhadap penerimaan waria, sehingga harapannya adalah para waria mendapatkan dukungan sosial untuk memaksimalkan wacana penanggulangan HIV-AIDS.

Dalam pembentukan bingkai pemberitaan LGBT Transpuan dalam media offline maupun online tidak dapat dilepaskan dalam memperbaiki pandangan masyarakat kepada kelompok transpuan. Mulai dari memberitakan isu LGBT Transpuan mengutamakan Teknik menulis berita yang berorientasi pada jurnalisme damai dan kebenaran, sehingga masyarakat bisa lebih memahami realita sesungguhnya. Peran Pemerintah Pusat juga harus konsisten hingga ke Pemerintah Daerah agar terjadi kesamaan persepsi dalam melihat kelompok transpuan. Tentu hal ini dapat memicu konsekuensi sebagaimana isu ini dipahami oleh khalayak. Media bersinergi dengan pemerintah sebagai praktisi yang memberikan citra penerimaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama saling menghargai perbedaan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa disamping peran USAID yang sangat penting dalam penanggulangan HIV-AIDS di Surabaya, pengaruh Pemerintah tetap menjadi landasan dasar terhadap keberadaan dan peran para Transpuan di Perwakos. Apabila Pemerintah daerah maupun nasional memaksimalkan dana pengobatan HIV-AIDS untuk para transpuan, maka kestabilan program komunitas Perwakos akan lebih baik dan tentunya stigma negatif terhadap para transpuan turut menurun karena Pemerintah memberikan kesempatan kepada para transpuan sama seperti masyarakat lainnya.

Rekomendasi

- (1). Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Surabaya sangat berkepentingan memastikan kebijakan kesehatan (*health policy*) yang lebih adil dan menjunjung HAM, agar semua orang tanpa memandang gender dan latar belakang mendapatkan hak pelayanan kesehatan dengan layak dan adil.
- (2). Kesenjangan orientasi intervensi dari USAID seharusnya tidak membuat Pemkot Surabaya seakan-akan lepas tanggung jawab. Seharusnya Pemkot Surabaya bisa lebih memperkuat dan mendukung kesadaran kritis masyarakat dalam menghilangkan stigma atau pandangan negatif terhadap kelompok transpuan.
- (3). Pemkot Surabaya terus berupaya untuk lebih memahami apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap transpuan, karena pelayanan kesehatan adalah hal yang mutlak dan hak seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang status atau gender.
- (4). Pengembangan kapasitas dukungan dana atau kesempatan pada Perwakos perlu dilakukan dengan pendekatan dan cara-cara untuk memperkuat keberpihakan, pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi dalam hidup bermasyarakat serta menjembatani gerakan perubahan sosial yang lebih menghargai sesama.

(5). Saran bagi pelaku media dan pemerintah adalah dengan memberitakan isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas atau transpuan dengan cara yang objektif dan hati-hati dengan penggunaan diksi yang tidak bermuatan menghakimi atau menguatkan stigma negative. Karena pembingkaiian pemberitaan dalam media mempengaruhi bagaimana khalayak mendefinisikan sebuah isu.

(6). Pemberantasan HIV-AIDS, utamanya menyangkut akses pelayanan kesehatan bagi semua kalangan dan menghilangkan hambatan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV-AIDS di Indonesia, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada orang-orang dengan resiko tertular HIV-AIDS.

(7). Sedangkan saran akademik dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji pemberitaan kelompok minoritas/ LGBT Transpuan dari rubrik yang lebih beragam, agar memperoleh *frame* yang lebih luas dan komprehensif. Karena mengingat, Transpuan dan HIV-AIDS bukan lagi menjadi isu nasional tapi menjadi isu internasional.

(8). Perlu adanya bantuan dana dan pengawasan yang konsisten sehingga pelaksanaan program yang sudah berjalan dalam penanggulangan dan penyuluhan HIV-AIDS bisa terus berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang, mengingat penyakit HIV-AIDS termasuk dalam epidemic internasional. Harapannya, program ini bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih baik secara meluas.

Daftar Pustaka

Buku

Baylis, J & Smith, S. (2005). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Cohn, J., Russell, A., Baker, B., Kayongo, A., Wanjiku, E., & Davis, P. (2011). Using global health initiatives to strengthen health systems: a civil society perspective. *Glob Public Health*, 6(7), 687-702. doi: 10.1080/17441692.2010.521165

Doyle, C., & Patel, P. (2008). Civil society organizations and global health initiatives: Problems of legitimacy. *Social Science and Medicine*, 66(9), 1928–1938.

Koeswinarno (2004). *Hidup sebagai waria*. Yogyakarta: LkiS

Jurnal

Assa'di, Husain. (2009). *Independensi LSM di Tengah Kepentingan Donor*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | Agustus 2009

Biesma, R. G., Harmer, A., Walsh, A., Spicer, N., & Walt, G. (2009). *The effects of global health initiatives on country health systems : a review of the evidence from HIV / AIDS control*. 239–252. <https://doi.org/10.1093/heapol/czp025>

Briefing paper by David P.Fidler, (2011) :Assessing the Foreign Policy and Global Health Initiative: *The Meaning of Oslo Process*".5

- Cohn, J., Russell, A., Baker, B., Kayongo, A., Wanjiku, E., & Davis, P. (2011). Using global health initiatives to strengthen health systems: a civil society perspective. *Global Public Health*, 6(7), 687-702. doi: 10.1080/17441692.2010.521165
- Commission, I. N. A. (2012). Republic of Indonesia Country Report on the Follow up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS) 2010-2011.
- Committee on Lesbian Health Research Priorities, Neuroscience and Behavioral Health Program, Health Sciences Policy Program, Health Sciences Section, Institute of Medicine (1999). *Lesbian Health: Current Assessment and Directions for the Future*. National Academies Press. p. 22. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6109&page=35
- Doyle, C., & Patel, P. (2008). Civil society organizations and global health initiatives: Problems of legitimacy. *Social Science and Medicine*, 66(9), 1928–1938.
- Fund, I. P. (2005-2008). Scaling Up the Indonesian AIDS Response Report on the Indonesian Partnership Fund for HIV and AIDS.
- Huang, K. (2012). *Tales of the Waria: Inside Indonesia's Third-Gender Community*. Online. <http://huffingtonpost.com>. Diakses 10 Februari 2022.
- Health, M. o., & Organization, W. H. (2011). Review of the Health Sector Response to HIV and AIDS in Indonesia 2011.
- Jönsson, C., & Jönsson, K. (2012). Global and local health governance: Civil society, human rights and HIV/AIDS. *Third World Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/01436597.2012.721261>
- Nasional, K. P. A. (2010). Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014.
- Nasional, K. P. A. (2011). Rangkuman Eksekutif Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 2006-2011: Laporan 5 Tahun Pelaksanaan Peraturan Presiden No.75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- PERPRES No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Pangaribuan, Purnama. 2021. "Kehidupan Transpuan yang tergabung dalam Perwakos". *Hasil wawancara pribadi*: 18 November 2021. Pacarkembang, Surabaya.
- Waltz, Kenneth (1998). "Globalisation and Governance", PS: Political Science and Politics, Vol. 32, No. 4, pp. 693-700.